



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.715, 2016

PERPUSNAS. Pengembangan. *Grand Design*.

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

GRAND DESIGN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berbudaya baca, pembangunan perpustakaan yang optimal, dan layanan perpustakaan yang proposional, perlu merumuskan perencanaan jangka panjang pengembangan program perpustakaan dalam suatu *Grand Design* Pengembangan Program Perpustakaan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang *Grand Design* Pengembangan Program Perpustakaan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
 11. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG
GRAND DESIGN PENGEMBANGAN PROGRAM
PERPUSTAKAAN NASIONAL.

Pasal 1

Grand Design Pengembangan Program Perpustakaan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Grand Design Pengembangan Program Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan program pembangunan perpustakaan.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2016

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI SULARSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
GRAND DESIGN PENGEMBANGAN PROGRAM
PERPUSTAKAAN NASIONAL

**GRAND DESIGN PENGEMBANGAN PROGRAM
PERPUSTAKAAN NASIONAL**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi seperti sekarang ini, perpustakaan tetap menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu sumber informasi. Berbagai macam informasi mengenai ilmu pengetahuan dan hiburan baik itu berupa media cetak maupun media elektronik bisa ditemukan dalam perpustakaan. Selain dari pada itu, perpustakaan juga merupakan suatu lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung sukses program pendidikan serta peningkatan sumber daya manusia.

Perpustakaan sebagaimana yang ada dan berkembang sekarang telah dipergunakan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian khasanah budaya bangsa, serta memberikan berbagai layanan jasa lainnya. Hal tersebut telah ada sejak dulu dan terus berproses secara alamiah menunjuk kepada suatu kondisi dan tingkat perbaikan yang signifikan meskipun belum memuaskan semua pihak.

Perpustakaan pada prinsipnya mempunyai tiga kegiatan pokok, yaitu pertama, mengumpulkan (*to collect*) semua informasi yang sesuai dengan bidang kegiatan dan misi organisasi dan masyarakat yang dilayaninya. Kedua, melestarikan, memelihara, dan merawat seluruh koleksi perpustakaan, agar tetap dalam keadaan baik, utuh, layak

pakai, dan tidak lekas rusak baik karena pemakaian maupun karena usianya (*to preserve*). Ketiga, menyediakan dan menyajikan informasi untuk siap dipergunakan dan di berdayakan (*to make available*) seluruh koleksi yang dihimpun di perpustakaan untuk dipergunakan pemakainya.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamankan dengan jelas mengenai hak, kewajiban dari masyarakat serta kewenangan dari pemerintah. Semua lapisan masyarakat baik itu di daerah terpencil, terisolasi dan terkebelakang, masyarakat yang sehat, cacat atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial, semuanya mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan dari perpustakaan. Masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga, memelihara, mengikuti setiap peraturan dari perpustakaan.

Pemerintah sebagai wakil dari rakyat berkewajiban untuk mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional. Pemerintah juga wajib menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air, dan juga menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, menjamin ketersediaan semua fasilitas perpustakaan, meningkatkan bukan hanya kualitas, tapi juga kuantitas dari koleksi perpustakaan. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah pusat terhadap perpustakaan sangatlah penting untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Perpustakaan Nasional yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya akan mengubah peran pustakawan menjadi lebih kompleks tetapi juga memunculkan pekerjaan baru yang berhubungan dengan aspek organisasi, penyebaran informasi, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan akses terhadap sumber-sumber informasi. Melalui penguatan pengembangan diharapkan mampu meningkatkan kualifikasi kapasitas dan kemampuan perpustakaan nasional yang dimiliki, sehingga dapat

berkembang mengikuti dinamika lingkungan organisasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya untuk memperkuat dan meningkatkan fungsi pengembangan perpustakaan nasional harus diawali dengan menyediakan instrumen strategis berupa perencanaan komprehensif yang fokus, bertahap, berkelanjutan dan melembaga yang dapat diterapkan oleh Perpustakaan Nasional. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional memandang perlu menyusun Grand Design Pengembangan Program Perpustakaan Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan *Grand Design* Pengembangan Program Perpustakaan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional.
9. Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2010 – 2014.

1.3 Maksud dan Tujuan

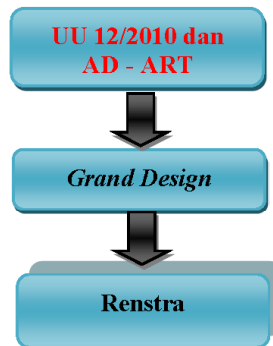
Maksud dan tujuan dari penyusunan *Grand Design* Pengembangan Program Perpustakaan Nasional yaitu:

1. Memberikan arah kebijakan pelaksanaan pengembangan Program Perpustakaan Nasional secara bertahap dan berkelanjutan;
2. Memberikan pedoman penyusunan Roadmap pengembangan perpustakaan per 5 (lima) tahunan;
3. Memberikan pedoman bagi Perpustakaan Nasional serta Pemerintah Daerah dalam merencanakan pengembangan perpustakaan secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

1.4 Keterkaitan *Grand Design* dengan perencanaan pembangunan nasional

Perencanaan merupakan suatu proses perumusan konsep yang berisi strategi serta tahapan dari kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan. Penyusunan *Grand Design* ini merupakan suatu rencana jangka panjang yang pada intinya fokus kepada pengembangan program-program dari Perpustakaan Nasional ke arah capaian tujuan yang telah dirumuskan. *Grand Design* Pengembangan Program Perpustakaan Nasional ini merupakan suatu dokumen perencanaan yang saling berkaitan dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun karena mencakup berbagai isu yang dihadapi dalam dinamika eksistensi Perpustakaan Nasional. Isu tersebut dikaji lebih mendalam melalui analisis untuk selanjutnya menentukan strategi-strategi guna menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

Di dalam dokumen perencanaan ini terdapat rencana rinci berupa rencana strategik yang berisi rencana rinci dari kegiatan yang akan dilaksanakan dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun secara jelas dan fokus sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten dan melembaga. Informasi yang harus dijelaskan dalam menentukan strategi-strategi adalah tahapan atau aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksanaan, penanggungjawab, dukungan yang dibutuhkan dan anggaran yang diperlukan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, rencana strategik dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran pencapaian kinerja serta monitoring dan evaluasi.



Alur Penyusunan *Grand Design* Pengembangan Program Perpustakaan

1.5 Metode Penyusunan

Metode penyusunan *Grand Design* Pengembangan Program Perpustakaan Nasional meliputi:

- Kajian
- Rapat dan diskusi
- Konsinyering
- Konsultasi
- Workshop
- Penyusunan dokumen

Bentuk-bentuk pekerjaan tersebut dijabarkan dalam metode-metode pekerjaan untuk menghasilkan output, yaitu Dokumen *Grand Design* Pengembangan Program Perpustakaan Nasional, dan metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

a. Inventarisasi

Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan pencatatan data. Dari kegiatan inventarisasi disusun daftar inventarisasi data dan informasi yang menunjukkan jenis maupun spesifikasi/rincian data dan informasi.

b. Identifikasi

Identifikasi adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk mengelompokkan dan mendefinisikan jenis data yang akan dikumpulkan secara baik serta memberikan kode sehingga dapat diketahui secara pasti fungsi dan kegunaan data tersebut.

2. Metode Analisa Data

a. Desk Analysis

- 1) Penelaahan dokumen perencanaan strategis (RPJPN, RPJMN, Renstra Kelembagaan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan pengembangan kelembagaan).
- 2) Penelaahan organisasi (Struktur dan Tata Kerja).
- 3) Hasil kajian/penelitian/studi serta dokumen-dokumen pengembangan perpustakaan di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang relevan.
- 4) Peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan perpustakaan.

b. Analisis dinamika lingkungan strategic pengembangan perpustakaan.

- 1) Tantangan dan dinamika lingkungan internal lembaga.
- 2) Tantangan dan dinamika lingkungan eksternal lembaga.

c. Kajian dan penyusunan materi perencanaan strategik jangka panjang (visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan perpustakaan nasional).

d. Kajian dan penyusunan materi arah kebijakan dan strategi pengembangan Perpustakaan Nasional (arah kebijakan pengembangan Perpustakaan Nasional serta strategi pengembangan Perpustakaan Nasional).

e. Kajian dan penyusunan materi perencanaan strategik jangka menengah berupa roadmap 25 tahunan (program prioritas pengembangan tahunan serta indikator keberhasilan program prioritas pengembangan tahunan).

3. Metode Workshop

a. Workshop Strategic Breakthrough

Kegiatan workshop ini menciptakan terobosan grand strategy perpustakaan nasional dan memetakan sasaran strategis yang mampu mempercepat pencapaian sasaran perpustakaan nasional dengan hasil yang terukur.

b. Workshop Strategic Alignment

Kegiatan workshop ini adalah kegiatan yang menghasilkan indikator pengembangan perpustakaan nasional. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur dalam pencapaian visi dan misi pengembangan perpustakaan nasional.

1.6 Sistematika

Sistematika *Grand Design* Pengembangan Program Perpustakaan Nasional diuraikan dalam pokok bahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Keterkaitan Grand Design dengan Dokumen Perencanaan, Metode Penyusunan dan Sistematika.

BAB II : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIK

Bab ini memuat Analisis Lingkungan Eksternal, Analisis Lingkungan Internal, Peluang dan Tantangan.

BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Perpustakaan Nasional

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

Bab ini memuat Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perpustakaan Nasional

BAB V : ROADMAP PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

Bab ini memuat program prioritas pengembangan Perpustakaan Nasional per 5 (lima) tahunan dan indikator keberhasilan Program Prioritas Pengembangan Tahunan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan serta rekomendasi pengembangan Perpustakaan Nasional.

BAB II ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

2.1 ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

Perkembangan pengelolaan perpustakaan di berbagai belahan dunia belakangan ini dihadapkan pada satu konsep pengelolaan perpustakaan bertaraf internasional (*world class library*). Konsep *world class library* menekankan pada kualitas layanan dan juga kuantitas koleksi karya-karya ilmiah di dalamnya. Menurut Princeton Review Gourman di Amerika, ada beberapa kriteria yang dapat menjadi indikator dalam mengukur dan mengkategorikan suatu perpustakaan menjadi *world class library*, yakni:

- a. *Services and collection* (pelayanan dan volume koleksi)
- b. *Acessibility* (aksesibilitas)
- c. *Variety of literary offerings* (keanekaragaman literatur yang disediakan)
- d. *Comfort and availability of reading/ studyng spaces* (kenyamanan membaca), dan
- e. *User Satisfication* (kepuasan pengguna).

Informasi terbaru mengenai focus perhatian utama dunia dalam hal *pengelolaan* perpustakaan dari hasil *International Conference of Academic Libraries* tanggal 12-15 February 2013 di New Delhi, India. menekankan pada:

- a. *Moving libraries to the web* (*computer and internet approach*). Salah satu isu hangatnya adalah pengembangan konsep *world digital library* yang menekankan pada pengelolaan literature dan koleksi perpustakaan berbasis pada *e-library* sebagai salah satu kriteria mewujudkan *world class library*. Sebagai contoh, penerapan *Machine Readable Cataloging* (MARC) dalam merekam berbagai jenis literature.
- b. Menciptakan standar bersama qualitative performance dalam hal layanan perpustakaan.
- c. Mendesain sistem kolaborasi internasional dalam hal pengelolaan koleksi-koleksi perpustakaan (*international collaboration*).

- d. Talent development bagi siapa saja yang tertarik akan dunia perpustakaan. Pengembangan kompetensi pustakawan melalui jejaring pustakawan internasional yang salah satunya dikomandoi oleh International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) melalui sejumlah programnya.
- e. Perubahan strategi manajemen pengelolaan perpustakaan.

Lebih lanjut, konsep pengelolaan perpustakaan menuju *world class library* juga menjadi salah satu topik utama dalam kongres *UNESCO Experts Meeting on the World Digital Library* tanggal 1 Desember 2005. Sebagai contoh, dalam kongres tersebut juga dibicarakan dan digalakkan sebuah konsep *world digital library*. *Digital library is a managed collection of information, with associated services, where the information is stored in digital formats and accessible over a network. A crucial part of this definition is that the information is managed.* Perpustakaan digital berfokus pada penyediaan dan penyimpanan data baik itu buku atau tulisan, gambar, suara, dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan computer. Dalam kongres yang di dalamnya juga melibatkan Indonesia disepakati bahwa *digital library* merupakan salah satu indikator menuju *world class library*.

Sedangkan dikawasan Asia Tenggara, CONSAL (*Congress of Southeast Asian Librarians*) menyadari adanya tuntutan untuk melakukan pengelolaan perpustakaan menuju *world class library*. Di dalam tuntutan perubahan tersebut, CONSAL berfokus kepada sumber daya manusia atau pustakawan yang ada di perpustakaan itu sendiri. CONSAL menyadari bahwa pustakawan sebagai bagian dari pelaku pendidikan otomatis harus mampu menyesuaikan diri, baik itu melalui peningkatan profesionalisme maupun kemampuan untuk berjejaring memperkuat hubungan dengan sesama pustakawan di tingkat nasional dan regional. Jejaring ini penting agar para pustakawan di Asia Tenggara mampu saling memperkuat diri dalam menghadapi 'serbuan' pelaku pendidikan dari luar Asia Tenggara. Program CONSAL berfokus pada :

- a. Pengembangan kompetensi dan jejaring pustakawan di tingkat Asia Tenggara. Pelestarian, pengelolaan dan pendayagunaan perpustakaan
- b. Pelestarian, pengelolaan dan pendayagunaan Perpustakaan
- c. Mobile library.

Di kawasan regional terdapat pula *International Conference on Asia Pasific Digital Libraries* berfokus pada :

- a. Investasi untuk pengembangan perpustakaan, seoptimal mungkin (*Optimalization of ICT Investment*).
- b. Menjalin kerjasama inter dan antar institusi agar terjadi interaksi pertukaran informasi dari negara yang kaya akan informasi ke negara yang miskin akan informasi (Information Resource Sharing).
- c. Mengembangkan digital library yang berisi digital content perpustakaan untuk bisa dimanfaatkan secara bersama seperti library devices, supporting languages, cataloging people, building collections, web, information visualization, search technology, service structures.
- d. Mengadakan pelatihan SDM Perpustakaan seperti exchange librarians yang berkelanjutan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bisa digunakan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan terutama perubahan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain kondisi yang menggambarkan pengembangan perpustakaan secara global seperti yang disebutkan di atas, juga dapat dilihat kondisi pengembangan pengelolaan perpustakaan secara nasional. Berdasarkan Laporan RPJMN 2004-2009, kondisi pengembangan perpustakaan secara nasional saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana layanan perpustakaan terutama di lingkungan Perpustakaan Nasional lebih diarahkan pada layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Salah satu bentuk layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut adalah tersedianya layanan perpustakaan melalui internet dan layanan koleksi

digital di Perpustakaan Nasional dengan alamat www.perpusnas.go.id

2. Pengembangan pengelolaan perpustakaan di tingkat daerah dapat dilihat dari meningkatnya kuantitas dan kualitas Perpustakaan Provinsi di 33 provinsi. Sementara di tingkat kabupaten/kota juga terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas perpustakaan umum di 437 kabupaten/kota. Capaian di tingkat Desa/Kelurahan juga ditandai dengan terbentuknya Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan sebanyak 10.529. Bahkan dalam rangka mewujudkan program perpustakaan keliling, Perpustakaan Nasional juga menyediakan 321 unit mobil perpustakaan keliling di 33 perpustakaan provinsi dan 252 Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota.
3. Perpustakaan Nasional juga berusaha meningkatkan koleksi Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dan berbagai jenis perpustakaan lainnya. Salah satu capaiannya adalah terlestarikannya naskah kuno (manuskrip) nusantara yang memiliki nilai budaya sangat berharga sebanyak 10.000 naskah. Selain itu juga terhimpun dan terkelolanya 80.000 eksemplar terbitan nasional (karya cetak dan karya rekam).
4. Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan perpustakaan, Perpustakaan Nasional telah merekrut pejabat fungsional pustakawan sebanyak 2.986 orang dan tenaga perpustakaan sebanyak 6.900 orang melalui pendidikan dan pelatihan teknis bidang perpustakaan. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga menyediakan pedoman penyelenggaraan perpustakaan, jabatan fungsional pustakawan serta pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan.
5. Dalam rangka peningkatan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap perpustakaan, Perpustakaan Nasional juga melaksanakan gerakan pemberdayaan perpustakaan dan pemasyarakatan minat baca.

2.1 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

Analisis lingkungan internal dilihat dari kondisi internal Perpustakaan Nasional yang meliputi beberapa aspek, antara lain:

- a. Jumlah dan Mutu Sumber Daya Manusia
Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan masih terbatas. Tugas dan fungsi yang dibebankan tidak sebanding dengan jumlah dan kualitas SDM. Hal ini dikarenakan keahlian dan kemampuan khusus yang dimiliki para pegawainya sangat terbatas. Tumpang tindih tugas serta kurangnya intensifikasi komunikasi antar unit juga menjadi salah satu bagian yang mempengaruhi kualitas kinerja SDM.
- b. Sarana dan Prasarana
Diversifikasi layanan perpustakaan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemustaka; layanan perpustakaan belum menjangkau ke seluruh wilayah tanah air; pedesaan, daerah terpencil, pulau-pulau kecil, maupun daerah perbatasan.
- c. Jumlah, Jenis dan Mutu Koleksi Bahan Pustaka
Koleksi berbagai jenis perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan jumlah produksi buku. Jumlah produksi buku hanya ± 6.000 judul pertahun. Apresiasi terhadap penyelamatan naskah kuno sebagai warisan budaya (memory of nation) yang memiliki nilai sangat berharga masih rendah dan sampai saat ini kepemilikan naskah-naskah kuno tersebut sebagian besar masih tersebar di masyarakat baik di dalam maupun luar negeri serta belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, sehingga belum semua terbitan di Indonesia terhimpun, terkelola, dan didayagunakan di Perpustakaan Nasional maupun Perpustakaan Provinsi.
- d. Sosialisasi
Melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

e. Anggaran

Untuk mengoptimalkan perkembangan Perpustakaan Nasional diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat.

Kondisi Perpustakaan Daerah juga menjadi bagian dari sasaran pengembangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Berikut ini beberapa aspek yang didapat berdasarkan data lapangan yang diambil sebagai sample dari kondisi Perpustakaan Daerah:

- a. Terhambatnya pelaksanaan dan penyelesaian program dan kegiatan yang disebabkan oleh topografi daerah dan kondisi cuaca;
- b. SDM bidang perpustakaan sangat kurang dikarenakan minimnya jurusan ilmu perpustakaan di Perguruan Tinggi di beberapa daerah;
- c. Alokasi anggaran pada setiap perpustakaan di daerah sangat bergantung kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu pola pikir sebagian SDM perpustakaan lebih kepada pendekatan anggaran bukan terfokus pada peningkatan minat baca masyarakat guna meningkatkan kualitas masyarakat di daerah tersebut;
- d. Kurangnya monitoring dari pusat terhadap program prioritas di desa;
- e. Penguasaan teknologi dan informasi baik dari pengelola maupun pengguna perpustakaan masih kurang;
- f. Belum adanya pilot project terkait perpustakaan desa yang bias menjadi standar bagi perpustakaan-perpustakaan desa yang lainnya;
- g. Kurangnya perhatian dari perpustakaan daerah mengenai operasional dari perpustakaan terapung dan perpustakaan keliling.

2.2 PELUANG DAN TANTANGAN

Kondisi perpustakaan saat ini masih tidak jauh berbeda dari masa lalu meskipun sudah semakin banyak orang yang mengerti ilmu tentang perpustakaan. Pandangan yang menganggap Perpustakaan sebagai

tempat yang ketinggalan zaman dipengaruhi oleh menurunnya ketertarikan masyarakat dalam membaca. Selain itu pula masyarakat menganggap lebih mudah mendapatkan informasi dan ilmu melalui internet dan media massa disbanding dengan datang dan mencari buku di perpustakaan yang cenderung memakan waktu lama. Sebenarnya ada hal yang perlu dipahami bahwa perpustakaan sebenarnya merupakan tempat yang menyediakan berbagai akses informasi. Hanya saja, perlu adanya pembenahan Perpustakaan di Indonesia serta pengembangan potensi yang dimiliki sehingga terciptanya efektifitas dan efisiensi yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam mencari ilmu dan informasi.

Perpustakaan Nasional masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, diantaranya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, perkembangan pusat - pusat informasi yang lebih bernuansa hiburan (infotainment), perubahan yang begitu cepat di segala sektor, manajemen perpustakaan yang masih konvensional dan sudah waktunya dikembangkan menjadi transparan, terbuka berdasarkan program kerja dan sasaran,

Disamping itu permasalahan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola Perpustakaan yang kurang memiliki kemampuan di bidang perpustakaan, baik kemampuan manajerial yang belum memadai serta tidak mampu memimpin, mengendalikan, dan memanfaatkan semua unsur dan faktor-faktor yang ada di perpustakaan.

Sektor-sektor atau bidang - bidang yang dimiliki sebagai peluang yang perlu dikembangkan dalam sebuah perpustakaan antara lain, adalah:

- a. Pengembangan koleksi.
- b. Pengembangan sumber daya manusia.
- c. Pengembangan masyarakat pemakai.
- d. Pengembangan sistem layanan.

Optimalisasi peluang yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dapat menjadi modal dasar yang harus dikembangkan guna menghadapi tantangan perubahan zaman

yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.3 ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis diatas, serta hasil wawancara dalam rangka mengevaluasi perkembangan perpustakaan daerah di ke-enam daerah, maka terpetakan isu-isu strategis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Komitmen stakeholders terhadap pengembangan perpustakaan masih rendah.
2. Kesadaran masyarakat untuk berbudaya baca masih rendah.
3. Kualitas dan kuantitas SDM Perpustakaan masih terbatas.
4. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.(Trend perkembangan mobile-library, dll).
5. Infrastruktur Perpustakaan masih kurang memadai.
6. Kapasitas Manajemen Perpustakaan masih belum optimal.
7. Anggaran untuk pengembangan perpustakaan masih terbatas.
8. Kurangnya koordinasi berbagai pihak baik internal maupun eksternal dalam pengembangan perpustakaan.
9. Koleksi perpustakaan masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat.
10. Diversifikasi layanan perpustakaan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemustaka.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL

3.1 Visi Perpustakaan Nasional

Perpustakaan merupakan jendela informasi bagi seluruh lapisan masyarakat, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi pelestarian khasanah budaya bangsa, serta memberikan berbagai layanan jasa lainnya. Tantangan utama yang dihadapi oleh perpustakaan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi dari masyarakat Indonesia untuk menggunakan layanan perpustakaan dan menjadi masyarakat yang gemar membaca. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, membaca masih belum menjadi pilihan karena dianggap membosankan. Masyarakat Indonesia lebih terbiasa dengan budaya tutur dari pada budaya tulis.

Untuk mewujudkan peran aktif masyarakat dalam penggunaan layanan perpustakaan, maka diperlukan penguatan fungsi layanan perpustakaan secara optimal. Melalui penguatan fungsi layanan perpustakaan diharapkan mampu meningkatkan fasilitas, profesionalisme SDM perpustakaan, koleksi Nasional, layanan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi agar mampu menggerakkan masyarakat menjadi masyarakat yang gemar membaca. Salah satu strategi yang kemudian dirancang oleh Perpustakaan Nasional adalah dengan menyusun dokumen Grand Design Perpustakaan Nasional 2014-2039.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam upaya penyusunan Grand Design Perpustakaan Nasional Tahun 2014 – 2039 ditetapkan Visi Perpustakaan Nasional, yaitu:

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berbudaya baca”

3.2 Misi Perpustakaan Nasional

Dalam rangka mewujudkan visi pengembangan Perpustakaan Nasional Tahun 2014-2039, maka perlu ditetapkan misi sebagai penjabaran visi pengembangan Perpustakaan Nasional. Berikut misi pengembangan Perpustakaan Nasional Tahun 2014 – 2039:

“Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melestarikan dan mendayagunakan warisan dokumenter intelektual bangsa”.

3.3 Tujuan Pokok Perpustakaan Nasional

Tujuan Perpustakaan Nasional 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yaitu:

1. Menggerakkan masyarakat untuk gemar membaca.
2. Meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan.
3. Meningkatkan profesionalisme SDM perpustakaan.
4. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap.

3.4 Sasaran Pokok Perpustakaan Nasional

Dalam rangka mewujudkan tujuan pokok Perpustakaan Nasional maka pengembangan Perpustakaan Nasional untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang diarahkan pada sejumlah sasaran pokok, yaitu:

Tujuan 1 : Menggerakkan masyarakat untuk gemar membaca.

Sasaran :

1. Setiap desa/kelurahan memiliki perpustakaan dan kelompok membaca yang aktif.
2. Setiap satuan pendidikan mendayagunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar.
3. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki perpustakaan umum yang menjadi pembinaan dalam mengembangkan perpustakaan di wilayahnya.
4. Semua lembaga mengembangkan perpustakaan khusus.

Tujuan 2 : Meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan.

Sasaran :

1. Seluruh perpustakaan memenuhi standar mutu pengelolaan dan pelayanan serta dapat menjangkau/dijangkau seluruh masyarakat di wilayahnya.

2. Perpustakaan nasional menjadi perpustakaan rujukan nasional, perpustakaan penelitian, perpustakaan deposit, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan.
3. Semua perpustakaan menerapkan sistem jejaring dan layanan terintegrasi yang dapat diakses secara on-line.
4. Seluruh program dan kegiatan perpustakaan dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan dan akuntabel.

Tujuan 3 : Meningkatkan profesionalisme SDM perpustakaan.

Sasaran :

1. Setiap perpustakaan memiliki pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang cukup dan memenuhi standar kompetensi.
2. Seluruh tenaga perpustakaan memperoleh pembinaan karir yang sesuai tuntutan pengembangan kualitas.

Tujuan 4 : Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap

Sasaran :

1. Perpustakaan Nasional mengelola naskah kuno nusantara dan bersama perpustakaan provinsi mengkoleksi semua karya cetak/karya rekam yang diterbitkan di Indonesia dan atau tentang Indonesia.
2. Semua perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota mengembangkan koleksi khas 'local content' guna melestarikan koleksi tentang budaya daerah.
3. Semua koleksi perpustakaan di Indonesia dilestarikan dan dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL

Pengembangan Perpustakaan Nasional membutuhkan arah kebijakan serta strategi yang lebih fokus dan terarah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perpustakaan Nasional dalam jangka panjang. Arah kebijakan perpustakaan nasional dibagi ke dalam 5 (lima) periode, yaitu:

4.1 Arah Kebijakan 2015 – 2019:

1. Peningkatan minat baca.

Arah kebijakan peningkatan minat baca ini bertujuan untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk minat terhadap berbagai macam bacaan. Minat baca dari masyarakat Indonesia perlu untuk ditingkatkan dan menjadi fokus bagi perpustakaan nasional di periode 5 (lima) tahun pertama ini.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

a. Promosi dan sosialisasi minat membaca.

Promosi dan sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media yaitu media tradisional dan media massa. Promosi dan sosialisasi ini perlu untuk dilakukan mengingat masyarakat kita sangat tertarik dengan bentuk-bentuk ajakan, himbauan, dalam bentuk lisan atau dalam bentuk poster bergambar.

b. Membangun komunitas membaca di masyarakat dan partisipasi industri penerbitan dalam menciptakan komunitas baca.

Komunitas membaca di masyarakat perlu untuk dibangun, begitu pula dengan industri penerbitan. Masyarakat perlu untuk diarahkan untuk minat terhadap buku, dan mulai membiasakan diri untuk membaca. Hal ini dapat dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil yang ada di suatu lembaga, atau instansi pendidikan, atau di pemerintahan. Komunitas membaca ini perlu dukungan dari industri penerbit yang secara langsung menjadi pemasok bahan bacaan. Kedua

unsur ini menjadi terkait satu dengan yang lain, dan saling melengkapi.

- c. Menyusun kerangka kerja kebijakan wajib baca bekerjasama dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Dalam menumbuhkan minat baca di masyarakat Indonesia, ada beberapa hal yang perlu untuk disusun, termasuk menyusun kerangka kerja kebijakan wajib baca. Lembaga pemerintah, sekolah dan perguruan tinggi perlu untuk menerapkan aturan-aturan internal terkait dengan jam membaca di lingkungannya masing-masing. Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal perpustakaan, maka kerjasama dalam bentuk penyusunan kerangka kerja kebijakan wajib baca dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat sangat penting karena menjadi dasar untuk membudayakan membaca di masyarakat.

2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola.

Penguatan kelembagaan dan tata kelola bertujuan untuk menata ulang dan menguatkan unit kerja Perpustakaan Nasional sehingga mampu menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, tidak tumpang tindih antara satu unit kerja dengan unit kerja yang lain, dan dapat memaksimalkan fungsi pelayanannya.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

- a. Membangun kerangka kerja kebijakan organisasi dan tata kelola perpustakaan berdasarkan pada jenis perpustakaan.
- b. Perpustakaan Nasional menjadi pembina bagi kegiatan instansi Pemerintahan bidang perpustakaan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kerangka kerja kebijakan organisasi dan tata kelola perpustakaan berdasarkan pada jenis perpustakaan.
- c. Mengembangkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan perpustakaan.
- d. Pengembangan standar dan pedoman dalam hal pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk menjamin kualitas

pengelolaan perpustakaan. Standar dan pedoman sangat diperlukan untuk mendorong setiap perpustakaan dalam hal peningkatan mutu pengelolaan perpustakaan.

- e. Memperkuat integritas, kapasitas dan kualitas sistem pengelolaan perpustakaan.
- f. Integritas, kapasitas dan kualitas dari suatu sistem pengelolaan perpustakaan sangatlah penting. Implementasi dari hal ini sangatlah luas, dan sangat berhubungan erat dengan strategi yang diatas. Inti dari strategi ini yaitu komitmen dari segenap unsur yang terlibat untuk memperkuat integritas dan kualitas dari sistem pengelolaan perpustakaan.
- g. Pengembangan koleksi perpustakaan.
- h. Pengembangan koleksi perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan keaneka ragaman informasi yang merupakan warisan dokumenter intelektual bangsa. Koleksi perpustakaan harus dikembangkan agar masyarakat mau menggunakan layanan perpustakaan.
- i. Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:
- j. Mengembangkan koleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- k. Strategi ini sangat penting untuk dilakukan karena kondisi dari masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam, membutuhkan layanan perpustakaan yang beragam juga. Koleksi perpustakaan untuk masyarakat dikawasan pesisir dan koleksi perpustakaan di kawasan pegunungan pastinya berbeda. Tujuan dari strategi ini yaitu untuk menyediakan layanan perpustakaan berupa koleksi perpustakaan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - a. Menghimpun, melestarikan dan menyediakan koleksi perpustakaan warisan dokumenter intelektual bangsa.
Strategi ini bertujuan untuk menghimpun seluruh bahan perpustakaan yang selama ini tersebar di masyarakat yang merupakan warisan dokumenter intelektual bangsa. Selama ini, masyarakat menyimpannya sendiri dan tidak dilaporkan ke pemerintah. Bahan

perpustakaan warisan dokumenter intelektual bangsa ini perlu untuk dilestarikan untuk dapat dilihat oleh generasi penerus bangsa.

b. Meningkatkan Koleksi '*center of excellence*'

Perpustakaan nasional sebagai lembaga pembina bagi perpustakaan yang ada di seluruh wilayah nusantara, maka perpustakaan harus terus meningkatkan koleksi dalam kaitannya menjadi pusat unggulan.

3. Pendayagunaan perpustakaan di masyarakat.

Keberadaan perpustakaan di masyarakat perlu untuk di dayagunakan. Arah kebijakan ini bertujuan untuk mengangkat keberadaan perpustakaan di masyarakat menjadi suatu tempat layanan publik, sama seperti pelayanan publik lainnya, contohnya rumah sakit, puskesmas, dll. Setiap masyarakat yang butuh informasi, tambahan pengetahuan dan ilmu dapat berkunjung dan memperolehnya di perpustakaan.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

a. Meningkatkan kapasitas semua jenis perpustakaan

Strategi ini sangat diperlukan untuk menunjang arah kebijakan yang diatas, dan bertujuan untuk membina agar kemampuan serta kapasitas perpustakaan desa/kelurahan memadai. Perpustakaan nasional mempunyai fungsi sebagai pembina terhadap semua perpustakaan baik itu di desa/kelurahan.

b. Mengintegrasikan layanan perpustakaan sebagai bagian dari layanan publik di masyarakat desa/kelurahan.

Strategi mengintegrasikan layanan perpustakaan sebagai bagian dari layanan publik di masyarakat desa/kelurahan membutuhkan dukungan dari semua pihak. Layanan publik di masyarakat desa/kelurahan yang ada sekarang lebih kepada layanan kesehatan, layanan pendidikan. Perpustakaan sendiri masih belum terintegrasi sebagai bagian dari layanan publik.

c. Membangun pola interaksi perpustakaan, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat ilmiah dalam

pengembangan repository dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi perpustakaan.

Strategi ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan akan layanan perpustakaan di kalangan masyarakat ilmiah, pemerintah dan perguruan tinggi. Strategi ini diperlukan untuk melibatkan semua pihak, lembaga pemerintah, masyarakat ilmiah untuk mendapatkan layanan perpustakaan.

4. Peningkatan profesionalisme SDM perpustakaan.

Aparatur perpustakaan perlu untuk meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan fungsi perpustakaan di masyarakat. Hal ini harus dilakukan baik itu dari segi kuantitasnya, maupun kualitas dari SDM perpustakaan itu sendiri. Arah kebijakan ini sangat perlu untuk dilakukan pada periode pertama ini, mengingat banyak hal yang harus dibenahi dari segi SDM perpustakaan.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

a. Meningkatkan kompetensi SDM perpustakaan.

Kompetensi SDM perpustakaan menjadi salah satu isu strategis yang terpetakan lewat desk analysis dan survei ke beberapa perpustakaan daerah. Kurangnya SDM yang kompeten di bidangnya menjadi permasalahan yang krusial dan perlu untuk di cari jalan keluarnya. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM perpustakaan, baik itu kemampuan teknis perpustakaan, maupun kemampuan manajerial perpustakaan.

b. Meningkatkan mutu dan ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dari perpustakaan lewat pemberian pelatihan kepada para pustakawan. Dari hasil evaluasi ke beberapa perpustakaan di daerah, rendahnya mutu dari para pegawai perpustakaan, serta ketersediaan dari lembaga pendidikan masih sangat kurang. Belum semua perguruan tinggi di Indonesia membuka jurusan perpustakaan di kampusnya. Hal ini secara langsung mempengaruhi bagi jumlah pustakawan di

daerah tersebut. Selanjutnya, kesejahteraan bagi para pustakawan juga perlu untuk diperhatikan.

- c. Meningkatkan peran asosiasi dalam memajukan dan melindungi profesi kepustakawanan.

Dalam meningkatkan profesionalisme SDM perpustakaan tentunya diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, dalam hal ini terdapat pula asosiasi profesi dari pustakawan itu sendiri yang sejauh ini merupakan wadah dalam sarana bertukar informasi dan sarana pengembangan kapasitas SDM tersebut.

5. Pengembangan diversifikasi layanan dan jejaring perpustakaan berbasis TIK.

Diversifikasi layanan dan jejaring perpustakaan berbasis TIK perlu untuk dikembangkan. Arah kebijakan ini sangat diperlukan untuk menunjang fungsi layanan perpustakaan dan jejaring perpustakaan berbasis TIK. Arah kebijakan ini mencakup kerjasama dengan berbagai pihak, serta jejaring antar perpustakaan. Teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi hal penting yang harus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kemajuan dari teknologi informasi semakin hari semakin maju membuat perpustakaan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

- a. Meningkatkan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi atau penerapan dari teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan. Hal ini mengingat perkembangan dari informasi dan teknologi itu sendiri sangat pesat, maka perpustakaan nasional juga harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi tersebut dengan cara meningkatkan implementasinya.

- b. Meningkatkan kerjasama dan jejaring antar perpustakaan.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kembali kerjasama dan jejaring antar perpustakaan. Kerjasama yang dilakukan berskala nasional dan internasional. Hal ini

penting bagi perpustakaan karena bisa sharing informasi dan pengetahuan dengan perpustakaan di negara lain, dan juga di negara sendiri.

- c. Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi perlu untuk dikembangkan. Layanan dalam perpustakaan memegang peranan penting, dan merupakan muara dari seluruh kegiatan di perpustakaan. Layanan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi perlu untuk dikembangkan karena bidang ini mengalami perkembangan yang pesat. Di skala internasional, perpustakaan nasional di negara lain, sudah menerapkan sistem layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Perpustakaan nasional di tuntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi.

4.2 Arah Kebijakan 2020 – 2024:

1. Peningkatan gemar membaca.

Kegiatan gemar membaca dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat akan pentingnya membaca. Membaca merupakan jendela utama dalam mendapatkan berbagai informasi. Melalui kegiatan gemar membaca masyarakat diharapkan bisa lebih melek huruf, terampil berbicara dan menulis serta mendorong kreatifitas.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

- a. Membangun sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan.

Program gemar membaca tidak hanya menjadi tanggung jawab perpustakaan nasional, akan tetapi juga tanggung jawab bersama terutama instansi-instansi pendidikan di Indonesia. Program gemar membaca memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan pendidikan di Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, program gemar membaca harus digerakkan secara sinergis oleh semua pihak untuk satu tujuan.

- b. Promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.

Kegiatan gemar membaca merupakan salah satu program unggulan yang sudah lama digerakkan oleh pemerintah. Namun kegiatan gemar membaca belum sepenuhnya menyentuh dan diketahui oleh lapisan masyarakat terutama masyarakat di daerah terpencil. Mengingat tujuan utama kegiatan gemar membaca yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, maka sudah seharusnya kegiatan gemar membaca menjangkau semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu dengan memanfaatkan perpustakaan diperlukan promosi program/kegiatan gemar membaca kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal batas dan geografis.

- c. Meningkatkan pola partisipasi industri penerbitan dalam menciptakan komunitas baca.

Salah satu bentuk strategi pelaksanaan program/kegiatan gemar membaca adalah dengan membentuk komunitas-komunitas membaca. Komunitas gemar membaca perlu dikembangkan dan disokong oleh berbagai pihak salah satunya industri penerbitan. Partisipasi aktif dari industri penerbitan akan sangat membantu perkembangan komunitas membaca di kalangan masyarakat. Di lain pihak, perkembangan komunitas membaca dengan sendirinya juga akan menjadi pangsa pasar yang strategis bagi industri penerbitan.

2. Pengembangan koleksi Indonesia yang lengkap dan mutakhir.

Koleksi perpustakaan merupakan salah satu faktor penting dalam menarik minat kunjungan masyarakat. Kebutuhan yang semakin kompleks mendorong masyarakat untuk mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, akurat dan mutakhir. Oleh karena itu, koleksi-koleksi perpustakaan harus dikembangkan

secara terus-menerus sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

- a. Meningkatkan pengelolaan koleksi naskah kuno nusantara.
Naskah kuno nusantara merupakan salah satu hasil pemikiran gemilang masyarakat nusantara di masa lampau. Naskah kuno memiliki kandungan nilai dan pandangan hidup serta telah memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa di masa kini. Pengelolaan dan pelestarian koleksi naskah kuno nusantara merupakan salah satu wujud pelestarian warisan budaya bangsa serta bertujuan menjamin keberadaan warisan budaya tersebut hingga ribuan tahun mendatang.
 - b. Meningkatkan pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di Indonesia dan atau tentang Indonesia (Indonesiana).
Koleksi indonesiana merupakan karya yang memuat tentang wajah peradaban dan kepribadian Indonesia sebagai sebuah bangsa. Peradaban bangsa Indonesia merupakan kebanggaan terbesar bangsa Indonesia. Kebesaran peradaban bangsa Indonesia perlu diperkenalkan dan ditunjukkan kepada bangsa lain sebagai sebuah identitas bangsa. Oleh karena itu, informasi Indonesiana perlu dikelola dan dikemas secara unik agar menarik perhatian dunia serta mampu meningkatkan jati diri dan indentitas bangsa di mata dunia.
3. Peningkatan diseminasi ilmu pengetahuan melalui perpustakaan.
Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru menjadi sangat penting dalam rangka membantu pengembangan masyarakat terutama masyarakat terpencil. Akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru merupakan masalah utama bagi perkembangan masyarakat terpencil. Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru di lingkungan perpustakaan terutama perpustakaan daerah akan sangat membantu dan

memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi terbaru.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

- a. Memperkuat kelembagaan perpustakaan dalam pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan.

Memperkuat kelembagaan dalam diseminasi ilmu pengetahuan membutuhkan kerangka kerja dan kebijakan nasional agar dapat di implementasikan secara optimal di semua tingkat perpustakaan. Kerangka kerja dan kebijakan nasional merupakan kunci dasar keberhasilan pelaksanaan kegiatan percepatan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b. Meningkatkan pola interaksi perpustakaan, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat ilmiah dalam pengembangan repository dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain kerangka kerja dan kebijakan, program/kegiatan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi juga memerlukan koordinasi dan interaksi antar lembaga. Koordinasi dan interaksi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan efektifitas dan sinergitas pelaksanaan diseminasi di semua tingkat perpustakaan.

- c. Membangun partisipasi aktif penerbit, lembaga penelitian dan pengkajian, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dalam diseminasi ilmu pengetahuan melalui perpustakaan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru cenderung diidentikkan sebagai karya dari masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah merupakan golongan masyarakat yang *concern* pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Partisipasi aktif penerbit, lembaga penelitian dan pengkajian, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan akan sangat membantu percepatan program/kegiatan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan perpustakaan.

4. Pelestarian dan diseminasi nilai-nilai warisan dokumenter intelektual bangsa.

Sama seperti naskah kuno, dokumenter intelektual bangsa di masa lalu merupakan warisan bangsa yang patut untuk dilestarikan. Pelestarian dan diseminasi nilai-nilai serta warisan dokumenter intelektual bangsa di masa lalu akan membantu menjamin kelestarian dan keberadaan warisan budaya tersebut sehingga dapat dinikmati oleh generasi di masa mendatang.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

- a. Memperkuat preservasi dan konservasi bahan pustaka warisan dokumenter intelektual bangsa.

Tidak semua bahan perpustakaan dapat diakses dan dinikmati secara bebas oleh lapisan masyarakat. Bahan perpustakaan yang menjadi warisan dokumenter intelektual bangsa merupakan koleksi perpustakaan yang perlu diperlakukan secara khusus agar informasi di dalamnya tidak disalahgunakan secara sembarangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

- b. Memperkuat preservasi warisan dokumenter dan budaya dalam format digital.

Perkembangan teknologi informasi banyak menawarkan wadah serta media yang menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi. Media-media tersebut memungkinkan penggunaannya menyimpan data dan informasi dalam berbagai format yang lebih aman dan akurat. Kehadiran media-media tersebut patut dimanfaatkan oleh perpustakaan dalam menjaga dan melestarikan dokumen-dokumen terutama dokumen warisan bangsa.

- c. Meningkatkan akses bahan pustaka warisan dokumenter intelektual bangsa.

Warisan dokumenter intelektual merupakan warisan bangsa sehingga perlu dikenal dan diketahui oleh semua masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan akses yang mudah bagi masyarakat dalam menjangkau dan menikmati warisan bangsa tersebut.

5. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis TIK.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi banyak menawarkan layanan yang sifatnya lebih *simple*, aman, nyaman,

dan ekonomis. Layanan-layanan tersebut juga layak diadopsi dan dikembangkan oleh perpustakaan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Kehadiran layanan berbasis TIK dipandang dan terbukti dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan diberbagai organisasi swasta maupun publik.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

- a. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan perpustakaan.
Kesiapan dan ketersediaan infrastruktur pendukung menjadi kunci utama keberhasilan layanan di berbagai organisasi baik publik maupun swasta. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dipandang dan terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan. Kenyamanan, kemudahan, kecepatan, serta keamanan menjadi ciri khas layanan berbasis TIK.
- b. Meningkatkan/memperkuat kerjasama dan jejaring antar perpustakaan baik nasional maupun internasional.
Kerjasama dan jejaring antar perpustakaan ditujukan untuk memudahkan proses koordinasi, sinkronisasi, serta pertukaran data dan informasi antar perpustakaan baik antara pusat dengan daerah maupun antar perpustakaan di daerah.
- c. Membangun *resource sharing* antar perpustakaan di Indonesia.
Resource sharing merupakan media berbasis TIK yang memungkinkan penggunaanya dapat berinteraksi secara *online*, mudah dan nyaman. Media *resource sharing* memungkinkan penggunaanya dapat berkomunikasi dan bertukar data dan informasi tanpa mengenal batas waktu dan geografis. Oleh karena itu, media *resource sharing* perlu dikembangkan di lingkungan perpustakaan agar membantu memudahkan kegiatan pertukaran data dan informasi antar perpustakaan pusat dan daerah.

6. Peningkatan koleksi dan akses pada '*center of excellence*'.

Center of excellence (layanan unggulan) merupakan salah satu pengembangan layanan yang berorientasi pada mutu dan kualitas layanan. Untuk mewujudkan *center of excellence* diperlukan SDM yang handal, teknologi informasi serta komitmen yang kuat dari anggota organisasi.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

- a. Mengembangkan koleksi dan layanan perpustakaan berbasis budaya lokal pada '*center of excellence*'

Layanan perpustakaan berbasis budaya lokal merupakan salah satu inovasi layanan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Layanan lebih ramah dan tepat sasaran karena menghadirkan suasana yang lebih dekat dan melekat dengan nilai-nilai kearifan lokal.

- b. Memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta dan adat, berbagai komunitas dan perorangan (ahli) untuk membangun komunitas budaya lokal pada '*center of excellence*'.

Keberhasilan layanan unggulan (*center of excellence*) hanya dapat dicapai melalui kerjasama dan komitmen antara *stakeholder* lokal. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat lokal diperlukan untuk menghadirkan dan membagikann nila-nilai kearifan lokal melalui media perpustakaan.

4.3 Arah Kebijakan 2025 – 2029:

1. Penanaman budaya membaca.

Penanaman budaya membaca merupakan salah satu upaya pengembangan potensi masyarakat. Melalui kegiatan membaca, individu diharapkan dapat berkembang dengan menggali informasi dan pengetahuan guna menghadapi perkembangan zaman

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

- a. Internalisasi budaya membaca di masyarakat.

Internalisasi budaya membaca merupakan upaya melekatkan dan membudayakan kebiasaan membaca di tengah masyarakat. Internalisasi kebiasaan membaca bertujuan agar kebiasaan membaca dapat menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Melalui pendekatan secara internal diharapkan

budaya membaca kembali tumbuh dan berkembang di masyarakat dan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan nasional.

- b. Mengembangkan ekosistem baca masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Pengembangan ekosistem baca masyarakat merupakan wujud nyata peningkatan minat baca di masyarakat. Diharapkan melalui pengembangan ekosistem baca ini, minat dan kebiasaan membaca akan meluas dan membudaya.

2. Peningkatan koleksi perpustakaan berbasis "*local content*".

Peningkatan koleksi perpustakaan berbasis budaya lokal (*local content*) diharapkan mampu menarik dan meningkatkan minat serta ketertarikan masyarakat terhadap layanan dan koleksi perpustakaan. Perpustakaan berbasis budaya lokal menekankan pada penyediaan informasi terkait nilai-nilai dan kearifan masyarakat lokal.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

- a. Meningkatkan pengelolaan koleksi khas bahan perpustakaan berbasis '*local content*'.

Perpustakaan berbasis '*local content*' merupakan perpustakaan yang mengedepankan nilai dan kearifan lokal. Perpustakaan yang memuat dan menawarkan koleksi-koleksi berbasis '*local content*' diharapkan akan lebih menarik minat dan ketertarikan masyarakat lokal terhadap layanan perpustakaan.

- b. Meningkatkan pelestarian bahan perpustakaan berbasis "*local content*".

Strategi ini sebagai bentuk upaya melestarikan bahan dan koleksi perpustakaan. Diharapkan melalui kegiatan pelestarian, keberadaan bahan dan koleksi berbasis '*local content*' dapat terjamin sebagai aset budaya daerah dan nasional.

3. Perpustakaan menjadi pusat *repository* warisan dokumenter intelektual bangsa dalam format *digital* (*National Cultural Heritage Repositories*).

Pengembangan perpustakaan sebagai pusat *repository* warisan dokumenter intelektual bangsa dalam format *digital* merupakan

salah satu arah kebijakan yang mengedepankan fungsi perpustakaan sebagai tempat penyimpanan warisan budaya bangsa. Pengembangan format *digital* bertujuan memberikan kemudahan dan keamanan terhadap akses data dan informasi.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

- a. Meningkatkan upaya alih media bahan perpustakaan yang mengandung warisan budaya nasional.

Upaya alih media bertujuan memberikan kemudahan dalam mengakses pencarian informasi mengenai warisan budaya nasional. Upaya alih media merupakan salah satu bentuk implementasi positif dari kemajuan teknologi informasi yang mempengaruhi eksistensi perpustakaan

- b. Membangun system *repository* warisan budaya dalam format *digital*.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menawarkan banyak media layanan yang mengutamakan kenyamanan dan kerahasiaan. Salah satu bentuknya adalah sistem *repository* koleksi perpustakaan dalam format *digital*. *Repository* bertujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan pencarian data dan informasi terutama mengenai warisan budaya.

4.4 Arah Kebijakan 2030 – 2034:

1. Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran, kultural dan sosial.

Salah satu arah pengembangan perpustakaan adalah multifungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan tidak lagi hanya sebagai sarana pembelajaran, akan tetapi juga sebagai sarana pengembangan sosio dan kultural masyarakat.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

- a. Mewujudkan perpustakaan sebagai ruang publik bagi interaksi intelektual, kultural dan sosial masyarakat.

Fungsi perpustakaan diharapkan tidak lagi hanya sebatas sarana mencari dan menggali informasi. Perpustakaan di masa mendatang dikembangkan sebagai ruang publik tempat interaksi intelektual, kultural dan sosial masyarakat.

- b. Meningkatkan ketersebaran layanan dan akses perpustakaan sesuai dengan karakteristik kecenderungan kebutuhan informasi, tipologi pemustaka, dan kondisi geografis di mana perpustakaan itu berada.

Strategi ini dilaksanakan sebagai bentuk pemerataan layanan dan akses perpustakaan serta jawaban atas tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi dan pengetahuan yang semakin meningkat. Ketersebaran layanan dan akses perpustakaan bertujuan agar masyarakat di seluruh daerah di Indonesia dapat menjangkau dan menikmati layanan perpustakaan.

2. Mengembangkan perpustakaan sebagai pusat unggulan budaya nusantara.

Selain mengemban fungsi pendidikan, perpustakaan juga diharapkan mampu mengemban fungsi budaya, yaitu sebagai pusat unggulan budaya nusantara. Koleksi-koleksi kuno serta dokumen-dokumen sejarah yang dilestarikan di lingkungan perpustakaan dipandang memiliki nilai budaya yang tinggi. Oleh karena itu, perpustakaan dengan segala koleksi kuno dan warisan bangsa di dalamnya dinilai layak menjadi pusat unggulan budaya nusantara.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap koleksi budaya nusantara.

Untuk layak menjadi pusat unggulan budaya nusantara, perpustakaan perlu menyediakan akses yang memudahkan semua masyarakat menjangkau dan menikmati koleksi sejarah dan warisan bangsa di dalamnya.

- b. Mengembangkan dokumentasi informasi dan layanan perpustakaan tentang budaya nusantara dan nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Kemudahan akses terhadap koleksi kuno dan dokumen warisan bangsa dapat dilihat dari layanan perpustakaan. Semakin baik layanan perpustakaan maka akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menikmati koleksi kuno dan dokumen warisan bangsa.

4.5 Arah Kebijakan 2035 – 2039:

1. Mengembangkan perpustakaan sebagai pusat pengetahuan masyarakat.

Pengembangan perpustakaan tidak lagi hanya sebagai lembaga pendukung, melainkan sebagai pusat pengetahuan masyarakat. Melalui pengembangan perpustakaan, diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pusat pendidikan dan pengetahuan seperti fungsi yang diemban oleh lembaga-lembaga pendidikan di masa kini.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

- a. Mewujudkan perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan rujukan ilmiah di masyarakat.

Di masa mendatang, perpustakaan diharapkan dapat berfungsi seperti lembaga-lembaga pendidikan di masa kini. Tidak berfungsi sebagai lembaga penyokong, akan tetapi sebagai pusat pengetahuan dan rujukan ilmiah bagi masyarakat.

- b. Memperkuat infrastruktur perpustakaan dalam pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru merupakan salah satu fungsi perpustakaan di masa mendatang. Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke lingkungan perpustakaan diharapkan dapat membantu akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Dengan demikian, posisi perpustakaan akan semakin vital dan strategis bagi masyarakat.

2. Perpustakaan menjadi pusat penggerak kemajuan peradaban bangsa.

Pengembangan perpustakaan tidak hanya pada fungsi pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga diarahkan menjadi pusat penggerak kemajuan peradaban bangsa. Keberadaan perpustakaan yang mampu mengemban fungsi pendidikan dan kebudayaan dipandang berpotensi menjadikan perpustakaan sebagai pusat penggerak kemajuan peradaban bangsa.

Arah kebijakan ini dapat dicapai dengan strategi:

- a. Mewujudkan perpustakaan sebagai institusi ‘memori kolektif bangsa’.

Beragam bahan dan koleksi yang tersimpan dan dilestarikan di dalamnya menjadikan perpustakaan layak dipandang sebagai sebuah institusi ‘memori’ kolektif bangsa. Sebagai institusi memori kolektif bangsa, masyarakat diharapkan dapat menemukan segala jenis informasi terutama dalam bidang pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan.

- b. Meningkatkan perpustakaan sebagai agen perubahan sosial dan budaya masyarakat.

Fungsi terbesar yang diharapkan mampu diemban oleh perpustakaan adalah sebagai agen perubahan sosial dan budaya. Perpustakaan dituntut untuk tidak lagi hanya sebagai organisasi yang ‘diam’, tetapi mampu ‘bergerak’ dan membawa inovasi serta perubahan di tengah peradaban masyarakat Indonesia.

BAB V
ROADMAP PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL

Road Map Pengembangan Perpustakaan Nasional merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Perpustakaan Nasional yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci dari pengembangan Perpustakaan Nasional dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran target per tahun yang jelas. Target yang ditetapkan dalam tahun pertama akan menjadi dasar bagi target tahun berikutnya, begitupun target tahun-tahun berikutnya mengacu pada target tahun sebelumnya. Dalam merumuskan program dan kegiatan, Perpustakaan hanya memiliki 3 (tiga) program yang seterusnya dijabarkan kedalam kegiatan, sub kegiatan dan sub-sub kegiatan.

5.1 Kegiatan Prioritas Pengembangan Tahunan

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Perpustakaan Nasional menyusun kegiatan prioritas yaitu:

1. Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
2. Kegiatan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional
3. Kegiatan Preservasi dan Koservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno
4. Kegiatan Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional
5. Kegiatan Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
6. Kegiatan Pengembangan Pustakawan
7. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan

Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut dijabarkan ke dalam Sub-sub Kegiatan, yang akan dilaksanakan pada periode lima tahunan pertama ini. Berikut ini sub-sub kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2015-2019:

1. Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
 - a. Kajian Perpustakaan
 - b. Kajian minat baca
 - c. Promosi dan Kampanye Media Cetak dan Elektronik

- d. Penyuluhan Pembudayaan Gemar Membaca
 - e. Pelaksanaan akreditasi sekolah
 - f. Pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi
 - g. Pelaksanaan akreditasi perpustakaan umum
 - h. Pelaksanaan akreditasi perpustakaan khusus
 - i. Perpustakaan yang akan dibantu
 - j. Perpustakaan khusus yang dibantu
 - k. Kajian kebijakan
 - l. Pembangunan gedung layanan di Jl. Merdeka Selatan
 - m. Pengadaan sarana dan prasarana gedung layanan
 - n. Perpustakaan keliling
 - o. Ekstensifikasi layanan
 - p. Meningkatkan ketersebaran keberadaan perpustakaan di wilayah Indonesia
 - q. Promosi pemanfaatan perpustakaan di masyarakat
 - r. Penyusunan desain standar gedung dan prasarana perpustakaan desa/kelurahan
2. Kegiatan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional
 - a. Bahan perpustakaan
 - b. Bahan perpustakaan siap layan
 3. Kegiatan Preservasi dan Koservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno
 - a. Alih media surat kabar dalam bentuk mikrofilm
 - b. Alih media bahan pustaka dalam bentuk reproduksi gambar bersejarah
 - c. Konservasi bahan pustaka
 - d. Penjilidan bahan pustaka
 - e. Pelaksanaan transformasi informasi digital ke media baru
 4. Kegiatan Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional
 - a. Terbitan nasional yang terhimpun
 - b. Terbitan nasional yang terkelola
 - c. Terbitan internasional yang terhimpun
 - d. Terbitan internasional yang terkelola
 - e. Terbitan nasional terdata dalam BNI
 - f. Terbitan nasional terdata dalam KIN
 - g. Judul terhimpun dalam katalog dalam terbitan (KDT)
 - h. Literatur sekunder yang diterbitkan

5. Kegiatan Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
 - a. Penerapan ISO 11620:2008-Library performance indicator dan ISO/TR 28118:2009 – Performance indicator for national libraries
 - b. Pengembangan kerjasama perpustakaan lingkup nasional, regional dan internasional
 - c. Pengembangan kerjasama perpustakaan, dokumentasi dan informasi
 - d. Pengembangan perpustakaan digital
 - e. Pembangunan layanan berbasis TIK Perpustakaan Nasional Pembuatan kemas ulang terpilih dalam format digital
 - f. Pembangunan layanan inovatif perpustakaan dokumentasi dan informasi
 - g. Inventarisasi, alih aksara, alih bahasa, penyalinan dan alih media naskah nusantara.
6. Kegiatan Pengembangan Pustakawan
 - a. Sertifikasi tenaga perpustakaan
 - b. Pembinaan karir pustakawan
7. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan
 - a. Peserta diklat
 - b. Diklat yang diakreditasi
 - c. Diklat yang dievaluasi
 - d. Alat diklat perpustakaan
 - e. Dokumen laporan pemantauan dan evaluasi

5.2 Indikator Keberhasilan Kegiatan Prioritas Pengembangan Tahunan

Setiap kegiatan prioritas yang ditetapkan diatas memiliki indikator keberhasilan masing-masing. Untuk menunjang keberhasilan dari masing-masing kegiatan, dan sub kegiatan diperlukan indikator sebagai tolak ukur keberhasilannya. Indikator-indikator tersebut yaitu:

1. Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca:
 - a. Jumlah kajian perpustakaan dan minat baca
 - b. Jumlah promosi/kampanye/penyuluhan pembudayaan gemar membaca
 - c. Jumlah perpustakaan yang sudah diakreditasi
 - d. Jumlah perpustakaan umum yang dikembangkan

- e. Jumlah perpustakaan khusus yang dikembangkan
 - f. Jumlah kerangka regulasi yang dikeluarkan
 - g. Tersedianya gedung fasilitas layanan perpustakaan
 - h. Jumlah perpustakaan keliling
 - i. Jumlah kunjungan
 - j. Jumlah perpustakaan
 - k. Jumlah desain Standar gedung, standar sarana prasarana
 - l. Jumlah kegiatan promosi pemanfaatan perpustakaan di masyarakat
2. Kegiatan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional:
- a. Jumlah penyediaan bahan perpustakaan
 - b. Jumlah pengolahan bahan perpustakaan
 - c. Jumlah pengolahan bahan perpustakaan
3. Kegiatan Preservasi dan Koservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno:
- a. Jumlah bahan pustaka yang sudah di reprografi
 - b. Jumlah pelestarian fisik bahan pustaka
 - c. Jumlah pelestarian bahan pustaka melalui transformasi digital
4. Kegiatan Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional :
- a. Jumlah Terbitan Nasional dan internasional yang terhimpun dan terkelola.
 - b. Jumlah terbitan nasional yang terdata dalam bibliografi nasional indonesia (BNI) dan katalog Induk Nasional (KIN).
 - c. Jumlah judul terbitan terhimpun dalam katalog dalam terbitan (KDT).
 - d. Jumlah literatur sekunder yang diterbitkan.
5. Kegiatan Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi :
- a. Jumlah indikator ISO 11620:2008-Library performance indicator dan ISO/TR 28118:2009-Performance indicator for national libraries yang terpenuhi
 - b. Jumlah kesepakatan kerjasama nasional, regional, dan internasional
 - c. Jumlah kerjasama perpustakaan, dokumentasi, dan informasi
 - d. Jumlah perpustakaan provinsi yang menggunakan perangkat e-library

- e. Jumlah perpustakaan kab/kota yang menggunakan perangkat e-library
 - f. Jumlah layanan berbasis TIK di Perpustakaan Nasional
 - g. Jumlah inovasi layanan perpustakaan dokumentasi dan informasi
 - h. Jumlah pengelolaan koleksi naskah Perpustakaan Nasional
6. Kegiatan Pengembangan Pustakawan :
- a. Jumlah tenaga perpustakaan yang disertifikasi
 - b. Jumlah pustakawan yang dikembangkan
7. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan :
- a. Jumlah peserta diklat perpustakaan
 - b. Jumlah diklat yang diakreditasi
 - c. Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi

BAB VI
INDIKATOR KEBERHASILAN ROAD MAP
PERPUSTAKAAN NASIONAL

Pada bagian ini akan menerangkan tentang indikator keberhasilan roadmap untuk periode pertama (tahun 2014 s/d 2019). Indikator ini menjadi target bersama seluruh unit organisasi yang ada di Perpustakaan Nasional. Indikator keberhasilan roadmap untuk periode pertama tahun 2014 s/d 2019 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sinergi dan keselarasan antar dokumen perencanaan.

Perencanaan yang baik menjadi pondasi awal keberhasilan suatu tujuan organisasi. Grand design Perpustakaan Nasional memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional seperti RPJPN dan RPJMN. Kerangka berfikir dalam penyusunan dokumen Grand design ini juga memperhatikan keterkaitan dengan Renstra Perpustakaan Nasional, RKT, dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi dari Perpustakaan Nasional. Menjadi harapan dan keinginan bersama seluruh stakeholder agar sinergi dan keselarasan perencanaan ini terus berjalan agar kesinambungan dan fokus perencanaan pembangunan perpustakaan nasional menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menciptakan Indonesia yang berbudaya baca di tahun 2039.

2. Tercapainya ISO 28118 Perpustakaan Nasional

Fungsi pelayanan publik mejadi bagian terpenting dalam fungsi-nya Perpustakaan Nasional. Pencapaian ISO 28118 tentunya menjadi tugas yang diemban seluruh stakeholder yang ada di Perpustakaan Nasional. ISO 28118 berisi 60 indikator yang harus dipenuhi oleh Perpustakaan Nasional. Indikator-indikator ini menjadi ukuran standar pelayanan bagi perpustakaan nasional secara internasional.

3. Tercapainya akuntabilitas kinerja dengan predikat penilaian B.

Selama 3 tahun berturut-turut (tahun 2011 s/d 2013) perpustakaan Nasional mendapat predikat “CC” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB untuk evaluasi akuntabilitas kinerja di

lingkungan Perpustakaan Nasional. Nilai (point) juga meningkat dari tahun 2011 (nilai 59,90) kemudian tahun 2012 (nilai 55,69) dan tahun 2013 (nilai 56,86). Indikator ini menjadi penting karena ini menunjukkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Menjadi target bersama bahwa pada akhir periode pertama tahun 2017, Perpustakaan Nasional akan mendapat predikat “B” untuk evaluasi akuntabilitas kerjanya.

Ke-3 indikator tersebut di atas menjadi titik penting pernyataan keberhasilan roadmap di periode 5 (lima) tahun pertama. Dan pencapaian ketiganya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi yang melekat pada seluruh stakeholder yang ada di lingkungan perpustakaan nasional.

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Grand Design Perpustakaan Nasional 2015-2039 berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan serta strategi, dengan maksud dan tujuan yaitu memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pengembangan Program Perpustakaan Nasional secara bertahap dan berkelanjutan, serta memberikan pedoman penyusunan roadmap pengembangan perpustakaan per 5 (lima) tahunan, dan juga memberikan pedoman bagi Perpustakaan Nasional serta Pemerintah Daerah dalam merencanakan pengembangan perpustakaan secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

Isu-isu strategis yang terpetakan dari hasil *desk analysis* serta survei ke beberapa perpustakaan daerah, juga hasil analisis lingkungan strategis yang sudah tersusun menjadi pijakan awal dari penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan dan strategi. Arah kebijakan dan strategi di petakan ke dalam 5 (lima) periode 5 (lima) tahunan, dengan disertai dengan penyusunan *roadmap* untuk periode pertama. Untuk periode yang kedua sampai dengan kelima tidak disusun *roadmap*, dikarenakan perlu adanya evaluasi terhadap ketercapaian dari roadmap lima tahunan pertama sebelum merencanakan program dan kegiatan prioritas di periode berikutnya.

7.2 Rekomendasi

Dokumen Grand Design Perpustakaan Nasional 2015-2039 telah menetapkan visi dan misi untuk 25 (dua puluh lima tahun kedepan). Untuk pencapaian visi tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, yaitu:

1. Komitmen dari Perpustakaan Nasional sebagai pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan dibidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Konsistensi kebijakan pemerintah dalam mendukung perpustakaan nasional sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam memajukan budaya dan intelektual bangsa.

3. Kerjasama serta koordinasi yang berkelanjutan dari beberapa instansi serta lembaga terkait, agar perencanaan ini dapat diimplemetasikan.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

SRI SULARSIH

ANAK LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
GRAND DESIGN PENGEMBANGAN PROGRAM
PERPUSTAKAAN NASIONAL, REPUBLIK
INDONESIA

MATRIK ROAD MAP PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2015-2039

Periode I										
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sub Kegiatan	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan minat baca	a. Promosi dan sosialisasi minat membaca	Program Pengembangan Perpustakaan	Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah kajian perpustakaan dan minat baca	1. Kajian perpustakaan	4 kajian	4 kajian	4 kajian	4 kajian	4 kajian
					2. Kajian minat baca	6 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi
				Jumlah promosi/kampanye/penyuluhan pembudayaan gemar	1. Promosi dan kampanye media cetak dan elektronik	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan

Periode I										
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sub Kegiatan	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
				membaca	2. penyuluhan pembudayaan gemar membaca	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan
				1. Jumlah Perpustakaan yang sudah di Akreditasi	1. Pelaksanaan akreditasi sekolah	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan
					2. Pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan
					3. Pelaksanaan akreditasi perpustakaan umum	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan
					4. Pelaksanaan akreditasi perpustakaan khusus	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
				2. Jumlah Perpustakaan Umum yang dikembangkan	1. Perpustakaan yang dibantu:					
					a. Kelurahan/desa	50 Wilayah	50 Wilayah	2050 Wilayah	2100 Wilayah	2150 Wilayah
					b. Kabupaten/kota	25 Perpustakaan	25 Perpustakaan	25 Perpustakaan	25 Perpustakaan	25 Perpustakaan

Periode I										
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sub Kegiatan	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
				3. Jumlah Perpustakaan khusus yang dikembangkan	c. komunitas	100	100	100	100	100
					Perpustakaan	Perpustakaan	Perpustakaan	Perpustakaan	Perpustakaan	
Penguatan kelembagaan dan tata kelola	a. Membangun kerangka kerja kebijakan organisasi dan tata kelola perpustakaan berdasarkan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perencanaan, Hukum, Humas dan Penganwasan Perpustakaan Nasional	Jumlah Peraturan dan perundang-undangan dan Analisis organisasi di Bidang Perpustakaan yang disusun	Perpustakaan khusus yang dibantu	100	100	100	100	100
					kajian kebijakan	2 naskah	2 naskah	2 naskah	2 naskah	2 naskah
					Perpustakaan	7 Perka	7 Perka	7 Perka	7 Perka	7 Perka

Periode I										
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sub Kegiatan	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
	pada jenis perpustakaan.	Perpustakaan nasional			dusun Analisis organisasi dan tataaksana	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah
						10 Naskah	8 Naskah	8 Naskah	8 Naskah	8 Naskah
						31 kali	31 kali	31 kali	31 kali	31 kali
						43 kali	43 kali	43 kali	43 kali	43 kali
				Jumlah Promosi Perpustakaan dan Koordinasi Antar Lembaga	Publikasi dan Promosi	7 Naskah	7 Naskah	8 Naskah	7 Naskah	8 Naskah
						11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah
						11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah
				Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Program dan Anggaran	Dokumen monitoring dan evaluasi Program dan Anggaran	11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah
						11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah
				Jumlah dokumen laporan pelaksanaan program dan anggaran	Dokumen laporan pelaksanaan	11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah
						11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah	11 Naskah

Periode I										
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sub Kegiatan	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
				Jumlah SK yang dikeluarkan	program dan anggaran					
				Jumlah SK yang dikeluarkan	Dokumen keputusan, pemberhentian dan pensiun					
					a. SK pengangkatan	110 orang	96 orang	82 orang	115 orang	115 orang
					b. SK pensiun	22 orang	25 orang	19 orang	44 orang	34 orang
				Jumlah SK kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	Dokumen keputusan kenaikan pangkat dan gaji	350 orang	350 orang	350 orang	350 orang	350 orang
				Jumlah naskah pegawai	Dokumen naskah kepegawaian	300 naskah	300 naskah	300 naskah	300 naskah	300 naskah
	b. Mengembangkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perencanaan, Hukum, Humas dan Pengawasan Perpustakaan Nasional	Jumlah norma, standar, pedoman, kriteria pengelolaan perpustakaan	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah

Periode I										
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sub Kegiatan	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
	perpustakaan.	Perpustakaan nasional								
	c. Memperkuat integritas, kapasitas dan kualitas sistem pengelolaan perpustakaan.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan nasional	Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Operasional Perkantoran Perpustakaan Nasional	Pengelolaan keuangan	Pengelolaan APBN Perpustakaan Nasional	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
				Terselenggaranya ketatausahaan, kerumah tanggaaan dan perlengkapan Perpusnas	Layanan perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
					Layanan ketatausahaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
					Layanan kerumah tanggaaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
					Layanan perlengkapan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

Periode I										
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sub Kegiatan	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan koleksi perpustakaan	a. Mengembangkan koleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Program Pengembangan Perpustakaan Nasional	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional	Jumlah penyediaan bahan perpustakaan	Bahan perpustakaan	150.000 buku	150.000 buku	150.000 buku	150.000 buku	150.000 buku
					Jumlah pengolahan bahan perpustakaan	20.000 buku	20.000 buku	20.000 buku	20.000 buku	20.000 buku
Pengembangan koleksi perpustakaan	b. Menghimpun, mestarikan	Program Pengembangan Perpustakaan	Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar	Tersedianya gedung fasilitas layanan perpustakaan	Pembangunan gedung layanan di Jl. Merdeka	1 gedung	1 gedung	-	-	-
					Jumlah pengolahan bahan perpustakaan siap layanan	20.000 buku	20.000 buku	20.000 buku	20.000 buku	20.000 buku
			Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Biro Umum Perpustnas	Jumlah Sarana Kerja Layanan Perpustakaan Nasional	Sarana Kerja Layanan Perpustakaan Nasional	321 Unit	321 Unit	321 Unit	321 Unit	321 Unit
			Pengawasan Interen Perpustakaan Nasional	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Akuntabilitas Perpustakaan Nasional	Laporan Pengawasan	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan
				Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan

Periode I										
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sub Kegiatan	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
	dan menyediakan koleksi perpustakaan warisan dokumenter intelektual bangsa.		Membaca	Jumlah perpustakaan keliling Jumlah kunjungan	Pengadaan sarana dan prasarana gedung layanan Perpustakaan keliling Ekstensifikasi layanan	- 6.000.000 orang	- 7.000.000 orang	1 Paket 8.000.000 orang	1 Paket 9.000.000 orang	1 Paket 10.000.000 orang
				Jumlah perpustakaan	Meningkatkan ketersebaran keberadaan perpustakaan di wilayah Indonesia	50 perpustakaan	60 perpustakaan	70 perpustakaan	80 perpustakaan	90 perpustakaan
	c. Meningkatkan koleksi 'center of excellence'.	Program Pengembangan Perpustakaan	Preservasi dan konservasi bahan pustaka dan naskah kuno	Jumlah bahan pustaka yang sudah di reprografi	Alih media surat kabar dalam bentuk mikrofilm Alih media bahan pustaka dalam bentuk reproduksi gambar	730 rol 5000 lembar	750 rol 5200 lembar	780 rol 5300 lembar	800 rol 5400 lembar	825 rol 5500 lembar

Periode I										
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sub Kegiatan	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
				Jumlah pelestarian fisik bahan pustaka	berseluruh	14.700	16.300	17.500	18.700	20.000
				Jumlah pelestarian bahan pustaka melalui transformasi digital	Konservasi bahan pustaka	Halaman dan 15.000 eksemplar	Halaman dan 15.000 eksemplar	Halaman dan 15.000 eksemplar	Halaman dan 15.000 eksemplar	Halaman dan 15.000 eksemplar
					Penjilidan bahan pustaka	5000	5500	6000	6500	7000
				Jumlah pelestarian bahan pustaka melalui transformasi digital ke media baru :	Pelaksanaan transformasi informasi digital ke media baru :					
					a. Dalam bentuk e-book	7500 e-book	8000 e-book	8500 e-book	9000 e-book	9500 e-book
					b. Dalam bentuk judul (audio, video dan web arsip)	2610 Judul	2710 Judul	2810 Judul	2910 Judul	3010 Judul
		Program Pengembangan Perpustakaan	Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional	Jumlah Terbitan Nasional dan internasional yang terhimpun dan dikelola	1. Terbitan nasional yang terhimpun : a. Karya cetak b. Karya rekam 2. Terbitan	13.600 Judul 400 Copy	14.280 Judul 400 Copy	14.994 Judul 400 Copy	15.743 Judul 400 Copy	16.530 Judul 400 Copy

Periode I											
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sub Kegiatan	Target					
						2015	2016	2017	2018	2019	
				Jumlah terbitan nasional yang terdapat dalam bibliografi nasional Indonesia (BNI) dan katalog Induk Nasional (KIN)	nasional yang dikelola: a. Karya cetak b. Karya rekam 3. Terbitan internasional yang terhimpun: a. Karya cetak b. Karya rekam 4. Terbitan internasional yang dikelola :						
						1. Terbitan nasional terdapat dalam BNI	13.600 Judul	14.280 Judul	14.994 Judul	15.743 Judul	16.530 Judul
						2. Terbitan nasional yang terdapat dalam KIN	400 Copy	400 Copy	400 Copy	400 Copy	400 Copy
						a. Karya cetak	1511 Judul	1587 Judul	1666 Judul	1749 Judul	1837 Judul
						b. Karya rekam	25 Copy	25 Copy	25 Copy	25 Copy	25 Copy
						5 Naskah		5 Naskah	5 Naskah	5 Naskah	5 Naskah
						2000 Entry		2000 Entry	2000 Entry	2000 Entry	2000 Entry
						1 Naskah		1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah	1 Naskah
						1000 Entry		1000 Entry	1000 Entry	1000 Entry	1000 Entry
						3000 Entry		4000 Entry	5000 Entry	6000 Entry	7000 Entry
						Jumlah judul terbitan					
						Judul terbitan					

Periode I											
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sub Kegiatan	Target					
						2015	2016	2017	2018	2019	
Pendayagunaan perpustakaan di masyarakat	a. Meningkatkan kapasitas semua jenis perpustakaan.	Program Pengembangan Perpustakaan	Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah desain Standar gedung, standar sarana prasarana	Perencanaan	4000	4000	4000	4000	4000	
					terhimpun dalam katalog terbitan (KDT)	Perencanaan	5 Naskah	5 Naskah	5 Naskah	5 Naskah	5 Naskah
					terhimpun dalam katalog terbitan (KDT)	Literatur sekunder yang diterbitkan	5 Naskah	5 Naskah	5 Naskah	5 Naskah	5 Naskah
Peningkatan layanan	b. Mengintegrasikan layanan perpustakaan sebagai bagian dari layanan publik di masyarakat desa/keurahan	Program Pengembangan Perpustakaan	Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca	Jumlah kegiatan promosi pemanfaatan perpustakaan di masyarakat	Promosi pemanfaatan perpustakaan di masyarakat	10 kegiatan	13 kegiatan	15 kegiatan	17 kegiatan	20 kegiatan	
					terhimpun dalam katalog terbitan (KDT)	Promosi pemanfaatan perpustakaan di masyarakat	10 naskah	10 naskah	15 naskah	15 naskah	15 naskah
					terhimpun dalam katalog terbitan (KDT)	Peningkatan layanan	10 naskah	10 naskah	15 naskah	15 naskah	15 naskah
Peningkatan layanan	c. Membangun	Program	Peningkatan layanan	Jumlah kesepakatan	Pengembangan	10 naskah	10 naskah	15 naskah	15 naskah	15 naskah	
					terhimpun dalam katalog terbitan (KDT)	Pengembangan	10 naskah	10 naskah	15 naskah	15 naskah	15 naskah
					terhimpun dalam katalog terbitan (KDT)	Pengembangan	10 naskah	10 naskah	15 naskah	15 naskah	15 naskah

Periode I										
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sub Kegiatan	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan profesionalisme SDM perpustakaan	a. Meningkatkan kompetensi SDM perpustakaan	Program Pengembangan Perpustakaan	Pengembangan pustakawan	Jumlah tenaga perpustakaan yang disertifikasi	Sertifikasi tenaga perpustakaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	150 Orang	150 Orang
						Jumlah pustakawan yang dikembangkan	Penbinaan karir pustakawan	180 Orang	210 Orang	240 Orang
Peningkatan mutu dan	b. Meningkatkan mutu dan	Program Pengembangan Perpustakaan	Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	Jumlah peserta diklat perpustakaan	Peserta Diklat	800 orang	800 orang	880 orang	880 orang	900 orang
						Jumlah diklat yang	Diklat yang	0	0	3 Lembaga

Periode I												
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sub Kegiatan	Target						
						2015	2016	2017	2018	2019		
	ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan			diakreditasi Jumlah diklat yang dievaluasi Jumlah Alat diklat perpustakaan	Diakreditasi Diklat Yang Dievaluasi Alat Diklat Perpustakaan	26 diklat	30 diklat	35 diklat	40 diklat	40 diklat		
						Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	5 Naskah	5 Naskah	5 Naskah	5 Naskah	5 Naskah
Peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi	Meningkatkan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan	Program Pengembangan Perpustakaan	Pengembangan pustakawan	Jumlah partisipasi asosiasi profesi pustakawan	Pembinaan pustakawan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		
Pengembangan diversifikasi layanan dan jejaring perpustakaan berbasis TIK	a. Meningkatkan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan	Program Pengembangan Perpustakaan	Peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi	Jumlah layanan berbasis TIK di Perpustakaan Nasional	Pembangunan layanan berbasis TIK Perpustakaan Nasional	5 kegiatan	6 kegiatan	7 kegiatan	8 kegiatan	9 kegiatan		

Periode I										
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sub Kegiatan	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
	Meningkatkan kerjasama dan jejaring antar perpustakaan	Program Pengembangan Perpustakaan	Peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi	Jumlah kerjasama perpustakaan, dokumentasi, dan informasi	Pengembangan kerjasama perpustakaan, dokumentasi, dan informasi	10 kegiatan kerjasama	15 kegiatan kerjasama	20 kegiatan kerjasama	20 kegiatan kerjasama	25 kegiatan kerjasama
						7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	7 Provinsi	6 provinsi dan 2 UPT
						Jumlah perpustakaan provinsi yang menggunakan perangkat e-library				
	Mengembangkan dan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	Program Pengembangan Perpustakaan	Peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi	Jumlah kemasa ulang informasi terpilih dalam format digital	Pembuatan kemasa ulang terpilih dalam format digital	10 kegiatan	12 kegiatan	14 kegiatan	16 kegiatan	20 kegiatan
						50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota
						Jumlah inovasi layanan perpustakaan dokumentasi dan informasi				
				Jumlah pengelolaan koleksi naskah	Inventarisasi, alih aksara, alih	10 Naskah	12 Naskah	14 Naskah	16 Naskah	18 Naskah

Periode I										
Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sub Kegiatan	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
				Perpustakaan Nasional	bahasa, peryalinan dan alih media naskah nusantara					
	d. Memperluas jangkauan layanan perpustakaan di masyarakat.	Program Pengembangan Perpustakaan	Peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi	Jumlah jangkauan layanan perpustakaan	Perluasan jangkauan layanan perpustakaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	e. Meningkatkan kinerja layanan perpustakaan sesuai dengan standar internasional (ISO).	Program Pengembangan Perpustakaan	Peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi	Jumlah inovasi layanan perpustakaan dokumentasi dan informasi	Pembangunan layanan inovatif perpustakaan dokumentasi dan informasi	0 Kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan